

PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI STANDAR PROSES PEMBELAJARAN PAI DALAM KURIKULUM MERDEKA DI MTS NU MOJOSARI NGANJUK

Muhammad Khisnun Himawan¹

¹ Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri

Email: gisnuhimawan@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi standar proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam dalam Kurikulum Merdeka serta mengidentifikasi problematika yang dihadapi guru di MTs NU Mojosari Nganjuk. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian lapangan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi pembelajaran, dan studi dokumentasi terhadap perangkat pembelajaran serta praktik penilaian dan pengawasan. Teknik analisis data dilakukan secara sistematis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan disertai uji keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi standar proses telah dilaksanakan pada aspek perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan pengawasan pembelajaran, namun belum berjalan optimal. Pada tahap perencanaan, guru menghadapi kendala waktu, diferensiasi pembelajaran, dan keterbatasan sarana. Pada pelaksanaan, pembelajaran berpusat pada peserta didik telah diterapkan, tetapi terbatasnya fasilitas teknologi menghambat optimalisasi media. Pada aspek penilaian, guru belum sepenuhnya memahami penilaian autentik. Sementara itu, pengawasan pembelajaran masih bersifat administratif dan belum memberikan pembinaan pedagogis secara berkelanjutan.

Kata Kunci: standar proses, Kurikulum Merdeka, pembelajaran PAI, problematika guru

Abstract

This study aims to describe the implementation of process standards in Islamic Religious Education learning within the Merdeka Curriculum and to identify the problems faced by teachers at MTs NU Mojosari Nganjuk. The study employed a qualitative approach with a field research design. Data were collected through in-depth interviews, classroom observations, and documentation studies of learning instruments as well as assessment and supervision practices. Data analysis was conducted systematically through data reduction, data presentation, and conclusion drawing, supported by data validity checks. The findings indicate that the implementation of process standards has been carried out in the aspects of planning, implementation, assessment, and supervision of learning, but has not yet been optimal. At the planning stage, teachers face constraints related to time, differentiated learning, and limited facilities. In the implementation stage, student-centered learning has been applied, but limited technological facilities hinder the optimal use of learning media. In the assessment aspect, teachers have not yet fully understood authentic assessment. Meanwhile, learning supervision remains largely administrative in nature and has not provided sustainable pedagogical guidance.

Keywords: process standards, Merdeka Curriculum, Islamic Religious Education, teacher challenges

PENDAHULUAN

Pendidikan dapat dipahami sebagai suatu bentuk kegiatan pembelajaran yang terjadi secara sadar, terarah dan terencana melalui proses timbal balik yang terjadi didalam kelas maupun diluar kelas antara guru dan siswa guna mengembangkan potensi yang ada dalam

diri siswa. Pendidikan merupakan hak yang mendasar yang dijamin bagi seluruh warga Negara tanpa terkecuali, sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Dasar 1945. Dalam hal ini, Negara memikul tanggung jawab utama untuk menyelenggarakan sistem pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada pengembangan intelektual, tetapi juga diarahkan untuk menanamkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta membentuk karakter dan akhlak mulia sebagai fondasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan berenegara.

Pendidikan Agama Islam (PAI) merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional Indonesia yang wajib di dapatkan oleh peserta didik dalam setiap satuan pendidikan, sebagaimana ditegaskan dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, yang memberikan jaminan kepada setiap peserta didik untuk memperoleh pembelajaran agama sesuai dengan keyakinan yang di imaninya. Melalui pendidikan agama nilai nilai dalam tujuan pendidikan nasional seperti keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia dapat ditanamkan secara berkelanjutan (Depdiknas, 2003).

Pelaksanaan pendidikan di Indonesia dijalankan berdasarkan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), menetapkan delapan standar wajib dalam penyelenggaraan pendidikan nasional. Delapan standar tersebut meliputi standar isi, proses pembelajaran, kompetensi lulusan, penilaian pendidikan, kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, standar pengelolaan, serta standar pembiayaan (Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 04 Tahun 2022 Tentang Standar Nasional Pendidikan, 2022). Seluruh komponen ini disusun untuk menjamin proses pendidikan berlangsung secara terstruktur, berkualitas, dan relevan dengan kebutuhan peserta didik serta tuntutan perkembangan zaman.

Dalam pembelajaran standar proses menjadi instrumen utama dalam peningkatan mutu karena mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, penilaian, hingga pengawasan pembelajaran sebagaimana yang tertuang dalam Permendikbud Nomor 16 Tahun 2022 (Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar Dan Menengah, 2022). Standar dapat dipahami sebagai tolak ukur atau acuan dasar yang menetapkan batas minimal yang harus dipenuhi dalam suatu penyelenggaraan kegiatan. Pada umumnya, standar merujuk pada tingkat pencapaian paling rendah yang wajib diwujudkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Dalam ranah pendidikan, standar proses merupakan seperangkat kriteria yang mengatur bagaimana kegiatan pembelajaran dilaksanakan di satuan pendidikan dasar dan menengah. Standar ini berfungsi sebagai pedoman agar proses pembelajaran berlangsung secara terarah dan sistematis agar mampu mengantarkan peserta didik mencapai kompetensi lulusan yang telah ditetapkan sekaligus menjadi dasar evaluasi dan perbaikan secara berkala dalam praktik pembelajaran.(Ilhami & Syahrani, 2024).

Keberhasilan implementasi kurikulum pada satuan pendidikan sangat bergantung pada peran strategis guru sebagai aktor utama yang menerjemahkan kebijakan kurikulum ke dalam praktik pembelajaran di kelas. Guru tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana, tetapi juga sebagai perancang dan pengelola proses pembelajaran, sehingga dituntut memiliki kompetensi pedagogik, profesional, dan adaptif dalam menyelenggarakan kegiatan belajar

mengajar sesuai dengan ketentuan serta standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Meskipun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa penerapan Kurikulum Merdeka, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan Standar Proses pendidikan, masih dihadapkan pada berbagai kendala dan hambatan, seperti keterbatasan pemahaman konseptual, kesiapan sumber daya, sarana prasarana, serta pendampingan yang belum optimal, sehingga pelaksanaannya belum sepenuhnya berjalan maksimal.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka dalam pembelajaran PAI masih menghadapi berbagai hambatan. Penelitian Iqbal Hidayatsyah Noor dkk. mengungkapkan bahwa sebagian guru PAI mengalami kesulitan dalam menyusun modul ajar berbasis capaian pembelajaran karena minimnya pelatihan teknis dan pendampingan profesional (Noor et al., 2023). Selanjutnya, studi Ahmad Syawaluddin dan Siti Raihan menunjukkan bahwa strategi pembelajaran berdiferensiasi belum terlaksana secara optimal akibat keterbatasan penguasaan metode pedagogik serta kesenjangan fasilitas belajar (Syawaluddin & Raihan, 2025). Pada aspek penilaian, penelitian oleh Ghufran Hasyim Achmad dkk mengungkapkan bahwa asesmen autentik sering kali belum terlaksana secara konsisten karena guru belum memahami langkah-langkah penilaian yang sesuai karakteristik Kurikulum Merdeka (Achmad et al., 2022).

Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa problematika implementasi standar proses pembelajaran PAI bukan sekadar fenomena lokal, melainkan persoalan yang juga ditemukan pada berbagai konteks satuan pendidikan. Meskipun penelitian terkait Kurikulum Merdeka semakin banyak dilakukan, kajian yang fokus pada implementasi Standar Proses dalam pembelajaran PAI masih terbatas. Selain itu, belum banyak penelitian yang mengkaji secara simultan keempat komponen standar proses perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan pengawasan secara utuh dalam satu kerangka analisis. Di sinilah terletak kesenjangan literatur yang penting untuk diisi.

Penelitian ini menjadi penting karena menawarkan kontribusi empiris mengenai bagaimana guru PAI mengimplementasikan Kurikulum Merdeka dalam kerangka Standar Proses. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pengembangan kebijakan dan praktik pendidikan, memberikan rekomendasi bagi penguatan kompetensi guru, serta memperkaya kajian teoritis mengenai implementasi kurikulum dalam pendidikan agama. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memiliki nilai praktis bagi satuan pendidikan, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan bagi literatur akademik dalam bidang Pendidikan Agama Islam.

METODE

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan jenis studi lapangan yang bertujuan menggali dan memahami secara komprehensif pelaksanaan Standar Proses dalam konteks Kurikulum Merdeka. Informan utama dalam penelitian ini adalah guru Pendidikan Agama Islam (PAI), sementara pengumpulan data dilakukan melalui wawancara secara mendalam, pengamatan langsung di lapangan, serta telaah dokumentasi pendukung. Data yang dianalisis bersumber dari data primer yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dan data sekunder yang berasal dari berbagai dokumen serta referensi relevan guna memperkuat dan memperkaya temuan penelitian.

Lokasi penelitian dilakukan di MTs NU Mojosari Nganjuk, yang dipilih karena telah menerapkan Kurikulum Merdeka, memiliki karakteristik keagamaan khas Nahdlatul Ulama, serta menunjukkan adanya tantangan dalam perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan pengawasan pembelajaran. Analisis data dilakukan melalui enam tahap, mulai dari perumusan masalah hingga penyusunan laporan, sedangkan keabsahan data dijamin melalui uji kredibilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Berdasarkan regulasi resmi Permendikbudristek Nomor 16 Tahun 2022, Standar Proses dimaknai sebagai kriteria minimum yang wajib dipenuhi dalam penyelenggaraan pembelajaran pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar capaian standar kompetensi lulusan dapat tercapai secara optimal. Standar ini berfungsi sebagai acuan operasional bagi pendidik dan satuan pendidikan dalam merancang serta melaksanakan proses pembelajaran yang berlangsung secara efektif dan efisien (Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar Dan Menengah, 2022). Standar proses meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan pengawasan pembelajaran yang saling terintegrasi. Pemenuhan seluruh tahapan tersebut bertujuan agar proses pembelajaran berlangsung efektif, efisien, dan mampu mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan (Anwari, 2021).

Untuk memperoleh gambaran awal mengenai implementasi standar proses pembelajaran PAI di MTs NU Mojosari, peneliti terlebih dahulu melakukan observasi terhadap praktik pembelajaran yang berlangsung di madrasah. Observasi ini difokuskan pada empat komponen utama standar proses, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan pengawasan pembelajaran. Hasil observasi tersebut disajikan dalam bentuk tabel guna memberikan pemetaan awal kondisi faktual pelaksanaan standar proses pembelajaran PAI sebelum dilakukan analisis yang lebih mendalam.

Tabel 1. Hasil Observasi

Aspek Standar Proses	Indikator yang Diobservasi	Temuan Lapangan
Perencanaan	Penyusunan ATP dan modul ajar	Guru menggunakan ATP Kurikulum Merdeka, namun diferensiasi memerlukan waktu lebih lama
Pelaksanaan	Metode dan pendekatan pembelajaran	PBL dan PjBL diterapkan, tetapi terbatas oleh fasilitas teknologi
Penilaian	Jenis dan teknik asesmen	Asesmen bervariasi, namun belum sepenuhnya autentik
Pengawasan	Supervisi akademik	Supervisi lebih bersifat administratif, observasi kelas belum optimal

Hasil observasi memberikan gambaran umum mengenai implementasi standar proses pembelajaran PAI di MTs NU Mojosari. Namun, untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terkait pengalaman, persepsi, dan kendala yang dihadapi dalam

pelaksanaan standar proses tersebut, peneliti melanjutkan pengumpulan data melalui wawancara mendalam. Wawancara dilakukan dengan guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di MTs NU Mojosari sebagai subjek penelitian, mengingat guru PAI merupakan pelaksana langsung proses pembelajaran di kelas. Wawancara mendalam dilakukan untuk menggali secara lebih komprehensif problematika yang dihadapi guru PAI dalam mengimplementasikan standar proses pembelajaran berbasis Kurikulum Merdeka. Data hasil wawancara kemudian dirangkum dalam bentuk tabel yang memuat inti jawaban informan, sehingga memudahkan pembacaan pola-pola problematika pada setiap komponen standar proses pembelajaran.

Tabel 2. Hasil Wawancara

No.	Indikator Wawancara	Kesimpulan Jawaban
1.	Perencanaan pembelajaran PAI berbasis Kurikulum Merdeka	Guru menyusun perencanaan pembelajaran PAI dengan mengacu pada Kurikulum Merdeka melalui penyusunan ATP, menyesuaikan materi, metode, dan model pembelajaran dengan karakteristik peserta didik di setiap kelas.
2.	Kendala dalam penyusunan perencanaan pembelajaran	Guru menyatakan bahwa penyusunan perencanaan berbasis diferensiasi membutuhkan waktu yang cukup lama karena harus menganalisis karakteristik peserta didik di setiap kelas.
3.	Pelaksanaan prinsip Merdeka Belajar	Guru menyampaikan bahwa pembelajaran PAI dilaksanakan dengan mendampingi peserta didik secara aktif dan tidak hanya menggunakan metode ceramah. Guru lebih sering menggunakan metode Problem Based Learning (PBL) dan Project Based Learning (PjBL) serta menyisipkan ice breaking dan permainan untuk meningkatkan partisipasi siswa.
4.	Kendala penggunaan media dan teknologi	Guru mengungkapkan bahwa keterbatasan sarana, seperti belum tersedianya proyektor dan fasilitas teknologi digital di kelas, menjadi kendala dalam pelaksanaan pembelajaran.
5.	Pemahaman terhadap asesmen autentik	Guru mengakui belum sepenuhnya memahami konsep dan penerapan asesmen autentik dalam Kurikulum Merdeka.
6.	Kendala dalam penyusunan asesmen	Guru menyampaikan bahwa penyusunan banyak bentuk asesmen untuk setiap kelas memerlukan waktu dan menjadi beban administratif tersendiri.
7.	Supervisi oleh pengawas madrasah	Guru menyatakan bahwa selama mengajar belum pernah mendapatkan supervisi langsung dari pengawas dinas.
8.	Pengawasan oleh kepala madrasah	Guru menyampaikan bahwa pengawasan lebih banyak dilakukan melalui absensi dan evaluasi saat rapat, tanpa observasi kelas dan umpan balik pedagogis secara langsung.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, guru PAI di MTs NU Mojosari telah menerapkan Kurikulum Merdeka, namun pelaksanaannya belum optimal. Hambatan masih ditemukan pada penerapan standar proses pembelajaran, khususnya dalam perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan pengawasan, sehingga diperlukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan agar pembelajaran berjalan lebih efektif dan sesuai tujuan peningkatan mutu pendidikan.

PEMBAHASAN

Problematika guru PAI dalam proses perencanaan pembelajaran berbasis Kurikulum Merdeka di MTs NU Mojosari

Perencanaan pembelajaran merupakan kegiatan yang dilakukan untuk merumuskan dan menetapkan tahapan tahapan yang harus ditempuh guna mewujudkan tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan (Sahjat & Buaja, 2022). Menurut Majid perencanaan pembelajaran adalah proses merumuskan tujuan, materi, pendekatan, media, serta penilaian yang terorganisasi agar kegiatan belajar dapat mencapai arah yang dituju (Majid, 2019). Melalui perencanaan yang matang dan sistematis, proses pembelajaran dapat berlangsung lebih terarah, efektif, dan efisien, sehingga mendukung perbaikan kualitas pembelajaran serta pencapaian hasil belajar peserta didik secara optimal.

Dalam Kurikulum Merdeka, perencanaan pembelajaran diawali dengan mengonversi capaian pembelajaran yang ditetapkan pemerintah menjadi tujuan pembelajaran yang berorientasi pada penguasaan kompetensi peserta didik. Tujuan tersebut kemudian disusun secara sistematis dalam alur tujuan pembelajaran (ATP) sebagai pedoman guru dalam mengatur urutan dan waktu pembelajaran, yang selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan modul ajar (Ardianti & Amalia, 2022). Alur tujuan pembelajaran yang sudah disusun sebagai pedoman untuk merancang modul ajar. Penyusunan modul ajar dilakukan untuk merancang kegiatan pembelajaran yang efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran dengan memperhatikan karakteristik dan keberagaman peserta didik. Oleh karena itu, guru menerapkan pembelajaran berdiferensiasi melalui variasi metode, pendekatan, dan media agar pembelajaran berlangsung bermakna dan menyenangkan (Samsiyah, 2022).

Berdasarkan hasil wawancara, guru PAI menyusun perencanaan pembelajaran dengan menyesuaikan ketentuan Kurikulum Merdeka. Guru menyesuaikan materi, metode, dan model pembelajaran dengan tuntutan capaian pembelajaran yang berlaku. Perencanaan dilakukan melalui penyusunan ATP tanpa menggunakan RPP tradisional, karena madrasah mengikuti kebijakan pemerintah meskipun berada di bawah yayasan pesantren. Hal ini menunjukkan adanya konsistensi kelembagaan dalam menerapkan Kurikulum Merdeka secara formal.

Namun demikian, berdasarkan hasil observasi dan wawancara ditemukan beberapa problematika penting. Pertama, penyusunan perencanaan pembelajaran berbasis diferensiasi memerlukan waktu yang lebih panjang, sebab setiap kelas memiliki kebutuhan belajar yang berbeda. Guru harus melakukan analisis karakteristik peserta didik sebelum menentukan metode dan aktivitas pembelajaran. Hal ini selaras dengan temuan Adnan Syah Sitorus yang menyebutkan bahwa diferensiasi adalah bagian tersulit dalam implementasi Kurikulum Merdeka (Sitorus, 2025).

Kedua, meskipun pelatihan MGMP membantu guru memahami penyusunan ATP, pemanfaatan teknologi seperti AI menunjukkan adanya upaya adaptasi guru terhadap tuntutan baru. Tetapi kondisi ini juga menyiratkan bahwa kapasitas pelatihan formal belum sepenuhnya mencukupi, sehingga guru mencari alternatif lain untuk memenuhi beban administratif kurikulum. Ketiga, terdapat kendala sarana prasarana, terutama dalam penyediaan media pembelajaran. Ketidaksiapan fasilitas membuat beberapa media yang direncanakan tidak dapat digunakan secara optimal. Kondisi ini menyebabkan sebagian perencanaan tidak dapat dilaksanakan di kelas, mengingat situasi pembelajaran sering

berubah secara dinamis. Guru menyebutkan bahwa kondisi kelas sering tidak terprediksi sehingga rencana pembelajaran kerap mengalami penyesuaian mendadak. Temuan ini menunjukkan bahwa secara umum guru PAI mampu menyusun perencanaan sesuai tuntutan kurikulum, namun menghadapi problematika dalam implementasinya seperti keterbatasan waktu, kesenjangan kompetensi, serta kendala sarana prasarana.

Problematika guru PAI dalam proses pelaksanaan pembelajaran berbasis Kurikulum Merdeka di MTs NU Mojosari

Pelaksanaan pembelajaran menjadi tahap krusial karena menunjukkan sejauh mana perencanaan diwujudkan dalam praktik kelas. Perencanaan yang tidak sistematis berisiko menyebabkan kegagalan pembelajaran dan menurunkan mutu pendidikan, sehingga guru perlu melaksanakan pembelajaran sesuai standar yang meliputi kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup agar proses belajar berlangsung efektif (Marheni et al., 2025).

Dalam penerapan Merdeka Belajar, guru dituntut menghadirkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, fleksibel, dan memberi ruang pengembangan potensi individu, sejalan dengan teori konstruktivisme sosial Vygotsky yang menekankan interaksi dan scaffolding (Vygotsky, 1978). Selaras dengan Permendikbudristek Nomor 16 Tahun 2022, proses pembelajaran harus berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, serta mendorong partisipasi aktif melalui interaksi bermakna antara guru, peserta didik, dan sumber belajar (Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar Dan Menengah, 2022).

Pelaksanaan pembelajaran perlu memberi ruang bagi inisiatif, kreativitas, dan kemandirian peserta didik sesuai bakat, minat, serta tahap perkembangannya, dengan guru berperan sebagai fasilitator dan pendamping. Melalui pendekatan ini, pembelajaran diharapkan mampu menciptakan pengalaman belajar yang bermakna dan mendukung pencapaian kompetensi lulusan.

Berdasarkan hasil wawancara, praktik pelaksanaan pembelajaran di madrasah menunjukkan bahwa guru telah berupaya mengadopsi pendekatan tersebut melalui berbagai strategi yang adaptif dan inovatif. Guru menerapkan prinsip Merdeka Belajar dengan menempatkan peserta didik sebagai subjek utama pembelajaran. Pendampingan dilakukan bukan hanya dalam bentuk penyampaian materi, tetapi juga melalui penguatan pengalaman belajar yang memungkinkan siswa terlibat secara aktif. Dalam hal metode, guru mengemukakan bahwa Problem Based Learning (PBL) dan Project Based Learning (PjBL) menjadi metode yang paling sering diterapkan karena keduanya mendorong partisipasi aktif, kemampuan berpikir kritis, serta kemandirian belajar. Untuk menjaga dinamika kelas, guru juga menyisipkan ice breaking dan games edukatif, sehingga suasana belajar tetap menyenangkan dan memotivasi.

Terkait penggunaan media dan teknologi pembelajaran, guru menghadapi kendala yang cukup signifikan. Minimnya sarana seperti ketersediaan proyektor di ruang kelas serta belum memadainya fasilitas teknologi digital menghambat optimalisasi penggunaan media berbasis teknologi. Meskipun demikian, guru tetap mencari solusi dengan memanfaatkan alternatif media yang tersedia dan mendorong peserta didik untuk menggunakan bahan ajar sederhana sebagai penunjang belajar. Adaptasi ini menunjukkan fleksibilitas guru dalam menghadapi keterbatasan infrastruktur.

Problematika guru PAI dalam proses penilaian pembelajaran berbasis Kurikulum Merdeka di MTs NU Mojosari

Penilaian pembelajaran sesuai Permendikbudristek Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Dasar dan Menengah dilaksanakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembelajaran untuk memastikan ketercapaian tujuan dan perkembangan kompetensi peserta didik secara utuh. Penilaian pembelajaran dalam Kurikulum Merdeka menekankan asesmen yang bersifat holistik, autentik, dan berorientasi pada capaian pembelajaran.

Berdasarkan hasil wawancara, guru melakukan penilaian capaian pembelajaran dengan memperhatikan aspek sikap, kognitif, kehadiran, dan nilai keseharian. Dalam praktiknya, guru menggunakan berbagai bentuk asesmen seperti asesmen formatif, sumatif, portofolio, dan tugas proyek. Variasi asesmen ini dilakukan agar pembelajaran tidak monoton dan dapat mengakomodasi gaya belajar siswa yang berbeda.

Meskipun demikian, analisis lebih lanjut menunjukkan adanya problematika signifikan. Guru menyatakan mampu melakukan penilaian berdasarkan format yang tersedia, tetapi di sisi lain mengungkapkan bahwa mereka belum memahami konsep penilaian autentik secara utuh. Kurangnya pemahaman ini menyebabkan guru cenderung mengandalkan asesmen konvensional dan observasi sederhana, bukan instrumen autentik seperti performance tasks, analytical rubric, atau real-world assessment. Problematika ini selaras dengan temuan Shifany Maulida Hijjah, Ubaid Ridlo, dan Raswan, bahwa banyak guru belum mendapatkan pelatihan memadai tentang asesmen autentik sehingga implementasinya sering tidak sesuai dengan tuntutan Kurikulum Merdeka (Hijjah et al., 2025).

Di sisi lain, guru menghadapi tantangan waktu dalam menyusun instrumen penilaian, terutama karena karakteristik siswa tiap kelas berbeda sehingga instrumen perlu disesuaikan secara diferensiatif. Kondisi ini diperkuat oleh Ahmad Mukhtar dkk yang menyebutkan bahwa beban kerja administratif guru semakin tinggi saat kurikulum menuntut asesmen autentik dan personalisasi pembelajaran. (Mukhtar et al., 2023). Dengan demikian, penilaian pembelajaran di MTs NU Mojosari telah mengarah pada prinsip Kurikulum Merdeka namun masih menghadapi kendala mendasar, terutama terkait keterbatasan pemahaman guru mengenai penilaian autentik serta tuntutan beban kerja dalam menyiapkan asesmen untuk kebutuhan diferensiasi siswa. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan kompetensi guru melalui pelatihan intensif, pendampingan pedagogik, dan penyediaan perangkat asesmen yang lebih komprehensif dari pihak madrasah maupun MGMP.

Problematika dalam proses pengawasan pembelajaran berbasis Kurikulum Merdeka di MTs NU Mojosari

Supervisi pembelajaran merupakan komponen penting dalam Standar Proses, berfungsi memastikan bahwa seluruh tahapan pembelajaran berjalan sesuai dengan prinsip pedagogis yang efektif. Menurut Glickman dalam Hanafiah dkk supervisi akademik idealnya dilakukan secara sistematis melalui perencanaan, observasi, dan tindak lanjut yang berfokus pada peningkatan profesionalisme guru (Hanafiah et al., 2025). Dalam konteks Kurikulum Merdeka, supervisi bahkan menjadi lebih krusial karena guru dituntut beradaptasi dengan pola pembelajaran yang fleksibel, diferensiatif, dan berorientasi pada capaian pembelajaran (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2020).

Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik supervisi di MTs NU Mojosari belum sepenuhnya memenuhi prinsip tersebut. Berdasarkan wawancara, diketahui bahwa tidak semua guru mendapatkan supervisi dari pengawas dinas, terutama guru muda yang sudah satu tahun mengajar tetapi belum pernah disupervisi. Ketidakteraturan supervisi ini menunjukkan adanya kelemahan pada sistem monitoring eksternal madrasah. Temuan ini sejalan dengan penelitian Sigit Hananto dkk yang menemukan bahwa distribusi supervisi dari pengawas madrasah sering tidak merata akibat keterbatasan jumlah pengawas, beban administratif, dan cakupan wilayah yang luas (Hananto et al., 2023).

Selain supervisi dari dinas, pengawasan internal oleh kepala madrasah juga terlihat belum optimal. Kepala sekolah melakukan pemantauan dengan cara memeriksa daftar kehadiran guru, absensi online, serta memberikan evaluasi umum dalam forum rapat. Namun, pemantauan tersebut tidak disertai observasi kelas secara langsung, dialog pedagogis, maupun umpan balik individual. Hal ini menunjukkan bahwa praktik supervisi masih bersifat administratif, bukan akademik. Padahal, menurut Salih Çevik dkk, supervisi yang berorientasi pada peningkatan mutu harus mencakup observasi kelas, refleksi kolaboratif, dan penyusunan rencana perbaikan (Çevik et al., 2020).

Praktik supervisi yang minim ini berdampak pada rendahnya pembinaan profesional guru, terutama dalam konteks Kurikulum Merdeka yang menuntut inovasi dan kesiapan pedagogik yang kuat. Tanpa supervisi akademik yang memadai, guru berpotensi mengalami kebingungan dalam menerapkan asesmen autentik, pembelajaran berdiferensiasi, dan strategi pengajaran berbasis proyek. Lebih jauh, absennya supervisi berkala berdampak pada tidak adanya feedback struktural terhadap pelaksanaan pembelajaran, sehingga guru cenderung mengandalkan prakarsa pribadi atau diskusi informal dengan rekan sejawat. Sementara budaya kolaborasi ini positif, namun tidak dapat menggantikan fungsi supervisi formal yang seharusnya memberi arah, standar kualitas, serta kontrol mutu pembelajaran.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Standar Proses dalam pembelajaran PAI berbasis Kurikulum Merdeka di MTs NU Mojosari telah berjalan sesuai arah kebijakan, namun masih menghadapi sejumlah problematika. Pada aspek perencanaan, guru mampu menyusun ATP dan menyesuaikan materi serta metode dengan capaian pembelajaran, tetapi menghadapi kendala waktu, kompleksitas diferensiasi, kurangnya pelatihan yang komprehensif, serta terbatasnya sarana prasarana sehingga beberapa rencana tidak dapat terlaksana secara optimal.

Pada aspek pelaksanaan, guru telah menerapkan pembelajaran berpusat pada peserta didik melalui metode PBL, PjBL, dan strategi aktif lainnya. Namun pelaksanaan masih terhambat oleh minimnya fasilitas teknologi seperti proyektor dan perangkat digital, sehingga media pembelajaran tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal. Meski demikian, guru tetap beradaptasi dan mengintegrasikan nilai-nilai keislaman khas NU dalam seluruh kegiatan belajar.

Dalam aspek penilaian, guru menggunakan variasi asesmen untuk mengukur sikap, pengetahuan, dan keterampilan siswa. Kendati begitu, pemahaman guru terhadap penilaian autentik masih terbatas, dan penyusunan instrumen asesmen yang harus disesuaikan dengan

karakteristik tiap kelas menjadi tantangan tersendiri. Beban administratif dan kurangnya pendampingan membuat asesmen autentik belum dapat diterapkan secara optimal.

Adapun pada aspek pengawasan, supervisi dari pengawas dinas belum merata dan belum menyentuh seluruh guru, terutama guru baru. Pengawasan internal kepala madrasah juga masih bersifat administratif tanpa observasi kelas atau umpan balik pedagogis. Minimnya supervisi akademik menyebabkan guru tidak memperoleh bimbingan profesional yang sistematis.

SARAN

Berdasarkan temuan penelitian, disarankan agar satuan pendidikan memperkuat dukungan terhadap implementasi standar proses melalui peningkatan pelatihan dan pendampingan pedagogis bagi guru Pendidikan Agama Islam, khususnya terkait pembelajaran berdiferensiasi, penilaian autentik, dan pemanfaatan teknologi pembelajaran. Selain itu, perlu optimalisasi peran kepala madrasah dan pengawas dalam melaksanakan supervisi akademik yang berkelanjutan dan berorientasi pada pembinaan profesional. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas subjek dan lokasi penelitian serta mengkaji model pendampingan atau supervisi yang efektif dalam mendukung implementasi Kurikulum Merdeka pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam.

REFERENCE

- Achmad, G. H., Ratnasari, D., Amin, A., Yuliani, E., & Liandara, N. (2022). Penilaian Autentik pada Kurikulum Merdeka Belajar dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Dasar. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(4), 5685–5699.
- Anwari, A. M. (2021). *Strategi Pembelajaran: Orientasi Standar Proses Pendidikan*. Edu Publisher.
- Ardianti, Y., & Amalia, N. (2022). Kurikulum Merdeka : Pemaknaan Merdeka dalam Perencanaan Pembelajaran di Sekolah Dasar. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan*, 6(3), 399–407. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jppp.v6i3.55749>
- Çevik, S., Yıldırım, S., & Zepeda, S. J. (2020). Leadership for socially-just supervision in K-12 schools in the context of the United States. *Multicultural Education Review*, 12(4), 306–322. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/2005615X.2020.1842671>
- Depdiknas. (2003). *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. (2020). *Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka*. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud RI.
- Hanafiah, Ratnawulan, T., & Dahlan, E. (2025). SUPERVISI AKADEMIK PENGAWAS UNTUK MENINGKATKAN KOMPETENSI KEPALA MTS N 1 BANDUNG. *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(30), 441–458.
- Hananto, S., Syahril, S., & Abun, A. R. (2023). Implementasi Supervisi Akademik Pengawas dan Kepala Madrasah Terhadap Guru Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Madrasah Aliyah Swasta Se Kabupaten Lampung Selatan. *Edukasi Islami : Jurnal Pendidikan Islam*, 12(1), 1133–1140.
- Hijjah, S. M., Ridlo, U., & Raswan. (2025). Implementasi Asesmen Autentik Kurikulum Merdeka Pada Mata Pelajaran Bahasa Arab SMP Islam Cikal Harapan 1 BSD. *Al-Muyassar: Journal of Arabic Education*, 4(1), 172–183.
- Ilhami, R., & Syahrani. (2024). PENDALAMAN MATERI STANDAR ISI DAN STANDAR PROSES. *JURPERU: Jurnal Pendidikan Dan Keguruan*, 1(12), 3399–

3405.

- Majid, A. (2019). *Perencanaan Pembelajaran: Mengembangkan Standar Proses Pembelajaran*. Remaja Rosdakarya.
- Marheni, W., Lestari, P. W., Sababalat, L., & Novalia, L. (2025). Perencanaan dan Pelaksanaan Pembelajaran yang Efektif. *Student Scientific Creativity Journa*, 01(1). <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.55606/ssej-amik.v3i1.4650>
- Muktamar, A., Yani, M., Lipu, A., Syawal, A. M., & Sajidah. (2023). Tantangan Implementasi Asesmen dalam Kurikulum Merdeka. *Cigarskruie: Jurnal Pendidikan & Studi Islam*, 1(1), 1–11.
- Noor, I. H., Izzati, A., & Azani, M. Z. (2023). Implementasi Kurikulum Merdeka Pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. *Iseedu Journal of Islamic Education Thoughts and Practices*, 07(01), 30–47.
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar Dan Menengah, (2022). <https://pusmendik.kemdikbud.go.id/pdf/file-99>
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pub. L. No. 57 (2021). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/165024/pp-no-57-tahun-2021>
- Sahjat, S., & Buaja, T. (2022). The Role of Principals in Excellent School Learning Management : A Case Study at SD Negeri 2 Kota Ternate. *International Journal of Elementary Education*, 11(4), 108–116. <https://doi.org/10.11648/j.ijeedu.20221104.14>
- Samsiyah, S. (2022). Analisis pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi untuk meningkatkan literasi numerasi siswa di sekolah dasar. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 10(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/jpd.v10i2.69859>
- Sitorus, A. S. (2025). Pembelajaran Berdiferensiasi pada Kurikulum Merdeka: Tinjauan Teoretis tentang Implementasi, Tantangan dan Peluang. *Action Research Journal Indonesia (ARJI)*, 7(2), 1159–1174. <https://doi.org/https://doi.org/10.61227/arji.v7i2.446>
- Syawaluddin, A., & Raihan, S. (2025). Penerapan dan Tantangan Pembelajaran Berdiferensiasi dalam Perspektif Alumni PPG Calon Guru Universitas Negeri Makassar di Sekolah Dasar. *Jurnal Publikasi Pendidikan*, 15, 183–195.
- Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. Harvard University Press.